



BAGIAN ANGGARAN 005.01.400172
PENGADILAN NEGERI BANTUL
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE 31 DESEMBER 2023



Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04
Telp. 0274367348 Fax. 0274367348
Bantul - DI Yogyakarta 55711
e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
Kode Satker 400172

BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04
Telp. 0274367348 Fax. 0274367348
Bantul - DI Yogyakarta 55711
e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Yogyakarta, 13 Februari 2024

SEKRETARIS

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 19790822 200502 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	44

(Lampiran berupa cetakan dari aplikasi EREKON-LK dan lampiran lainya yang mendukung seperti

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan
5. Laporan Pengembalian Pendapatan

6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Lampiran Pendukung Lainnya

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	3
Tabel Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	4
Tabel Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	5
Tabel Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	6
Tabel Rekapitulasi Satker	8
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	12
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja	17
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2022	17
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	18
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2022	18
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	19
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	20
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	21
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	21
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	22
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	23
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2023	23
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	25
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	26
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023	28
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023	28
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30
Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023	30
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	31
Tabel Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun	31
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023	32
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023	33
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023	34
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023	34
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023	35

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023	33
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023	36
Tabel Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	36
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023	37
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas	39



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No.4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax.
(0274)367348

Laman: www.pn-bantul.go.id, Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

SEKRETARIS

Pengadilan Negeri Bantul



Yuyun Fithriyah, S.E.,Ak

NIP. 19790822 200502 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.48.964.086 atau mencapai 855 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.5.729.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.6.687.104.647 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.787.710.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.22.130.993.715 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.15.086.852; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.22.115.906.863; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.2.993.640 dan Rp.22.128.000.075.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.4.756.906, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.7.504.833.458 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.7.500.076.552). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos

Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.43.230.180 dan (Rp.7.456.846.372) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.7.456.846.372).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.22.868.017.029 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp.7.456.846.372) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp.17.272.857) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.6.699.556.561 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp.740.016.954) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.22.128.000.075.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% thd Angg	31-Des-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.729.000	48.964.086	855	8.325.440
JUMLAH PENDAPATAN		5.729.000	48.964.086	855	8.325.440
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.448.991.000	5.349.065.336	98	5.601.642.240
Belanja Barang	B.4	1.310.719.000	1.310.039.311	100	1.396.497.637
Belanja Modal	B.5	28.000.000	28.000.000	100	651.570.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		6.787.710.000	6.687.104.647	99	7.649.709.877

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI BANTUL NERACA PER 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	1.666.667	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	13.420.185	6.079.100
Jumlah Aset Lancar		15.086.852	6.079.100
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	17.638.690.000	17.638.690.000
Peralatan dan Mesin	C.15	3.945.244.919	3.588.092.419
Gedung dan Bangunan	C.16	7.915.821.000	7.879.548.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	36.273.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	48.342.062	48.342.062
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7.432.191.118)	(6.315.384.195)
Jumlah Aset Tetap		22.115.906.863	22.875.561.286
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	76.071.000	150.071.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(76.071.000)	(150.071.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		22.130.993.715	22.881.640.386
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1.039.640	12.646.357
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	1.954.000	977.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.993.640	13.623.357
JUMLAH KEWAJIBAN		2.993.640	13.623.357
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	22.128.000.075	22.868.017.029
JUMLAH EKUITAS		22.128.000.075	22.868.017.029
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.130.993.715	22.881.640.386

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.756.906	7.163.000
JUMLAH PENDAPATAN		4.756.906	7.163.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.338.226.330	5.609.925.646
Beban Persediaan	D.3	65.207.890	75.964.200
Beban Barang dan Jasa	D.4	665.479.370	772.170.789
Beban Pemeliharaan	D.5	549.372.091	523.660.399
Beban Perjalanan	D.6	20.204.497	7.950.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	866.343.280	882.106.648
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7.504.833.458	7.871.777.682
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.500.076.552)	(7.864.614.682)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		43.230.096	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		43.230.096	0
Defisit Selisih Kurs		-	0
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		84	185.440
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		84	185.440
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		43.230.180	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7.456.846.372)	(7.864.429.242)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7.456.846.372)	(7.864.429.242)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-22
EKUITAS AWAL	E.1	22.868.017.029	22.863.427.441
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.456.846.372)	(7.864.429.242)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	17.272.857	(42.792.857)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	17.272.857	(42.792.857)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		17.272.857	(42.792.857)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.699.556.561	7.911.811.687
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(740.016.954)	4.589.588
EKUITAS AKHIR	E.6	22.128.000.075	22.868.017.029

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Badan Akun Standar
14. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19
15. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal tindak lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
16. PMK Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA)

17. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester II Tahun 2023.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Wilayah Pengadilan Negeri Bantul

Profil dan
kebijakan
Teknis Unit
Wilayah
Pengadilan
Negeri
Bantul

Pengadilan Negeri Bantul merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan Peradilan Perdata Islam dan Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Prof Wirjono Prodjodikoro (Dongkelan) No.321 Dongkelan Yogyakarta. Sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang akuntabilitas dan transparan.

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang luhur, bermartabat dan berwibawa. Visi Pengadilan Negeri Bantul tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum sebagai penegak hukum yang profesional ;
- b. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e. Meningkatkan pengawasan aparatur Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis ,adapun arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding secara sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (Acces to Justice) di Pengadilan Negeri Bantul;
3. Melanjutkan implementasi reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Bantul;

4. Meningkatkan penguatan pengawasan implementasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Bantul yang bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai perkembangan teknologi dan aturan saat ini aplikasi SAIBA-SIMAK dan Persediaan sudah tidak digunakan lagi saat ini digunakan aplikasi web base yaitu SAKTI dan MONSAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Bantul menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Bantul dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

*Dasar
Pengukuran*

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Dasar
Pengukuran

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan sewa Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya seperti Penjualan Aset Tetap
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN seperti Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah seperti Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- Pendapatan Anggaran Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2007 dan 2018.
 - Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud (ATB)

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

A.7. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

- 1) Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni dan S-555/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1007/SEK/KU.00/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2020 poin 24 menyatakan sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk mengajukan revisi dan ralat dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran yang telah merealisasi belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya sesuai Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga kesesuaian Bagan Akun Standar sesuai peruntukannya dan meminimalisir melakukan jurnal penyesuaian manual melalui Aplikasi SAIBA.
- 2) Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020, ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK/KU.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Pemuthakiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang menyatakan:
 - a) Dengan adanya ketentuan pemuthakiran segmen akun khusus COVID-19, maka Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan/ pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19
 - b) Dalam hal Satuan Kerja telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi

belanja (SPM/SP2D)

- c) Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 2, agar Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Mitra Kerja pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN dan tidak menyebabkan pagu minus
- Apabila pagu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53) telah terealisasi seluruhnya dan Satuan Kerja mengalami kesulitan dalam proses revisi anggaran dapat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan matriks pergeseran dan Laporan Realisasi Anggaran
 - Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan revisi anggaran tidak mendapat pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau tidak mendapat alokasi pergeseran anggaran dari pusat maka Satuan Kerja melakukan Jurnal Penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.

Contoh kasus:

Terdapat realisasi belanja pembelian masker menggunakan akun 521111 tidak dapat dilakukan revisi dan ralat ke akun COVID-19 lakukan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	XXX	Laporan Operasional
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		Laporan Operasional

Terdapat realisasi belanja pembelian *thermogun* diatas nilai kapitalisasi menggunakan akun 521111 dan diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	Neraca
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	XXX	Laporan Operasional

- d) Satuan Kerja diminta melaporkan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun lama dan belum melakukan pemuthakiran akun COVID-19 melalui format dalam bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19
- e) Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19.

A.8. Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada Laporan Keuangan ini tidak terdapat Output Strategis karena berada pada Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (01), sedangkan Laporan ini merupakan Bagian Anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01). Berikut Capaian Output Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 diambil dari SMART.

No	Kode Satker	Nama Satker	Program/ Kegiatan/ Output	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Rencana Output	Realisasi Output	Satuan Output	Persentase Capaian Output
1	400172	Pengadilan Negeri Bantul	WA.1066.EBA.962	11,605,000	100	1	1	Layanan	100
			WA.1066.EBA.994	6,647,499,864	99	1	1	Layanan	99
			WA.1071.EBB.951	28,000,000	100	4	4	Unit	100

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disesuaikan dengan program belanja pemerintah serta dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yaitu terdapat revisi antar satker berupa Belanja Barang akun 522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim. Pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja
Per 31 Desember 2023*

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan PNB	5.729.000	5.729.000
Jumlah Pendapatan	5.729.000	5.729.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.198.991.000	5.448.991.000
Belanja Barang	1.285.719.000	1.310.719.000
Belanja Modal	0	28.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	7.484.710.000	6.787.710.000

*Realisasi Pendapatan
Rp.48.964.086*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.48.964.086 atau mencapai 855 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.5.729.000. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan-Belanja Tahun 2023

Uraian	31-Des-23		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	43.230.096	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.729.000	5.733.906	855
Pendapatan Lain-lain		0	0
Pengembalian Pendapatan	0	0	0
Jumlah	5.729.000	48.964.086	855

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 naik dari tahun sebelumnya sebesar 588,13 % yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.733.906 yang terdiri atas sewa rumah dinas sebesar Rp. 3.779.906 dan sewa kantin sebesar Rp. 1.954.000 serta berasal dari pendapatan penjualan aset secara lelang melalui KPKNL sebesar Rp.43.230.096.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	48.964.086	8.140.000	601,52
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	43.230.096	0	100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Banguna	5.733.906	8.140.000	(30,36)
Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	-	0,00
Pendapatan Lain-Lain	-	185.440	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	185.440	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	48.964.086	8.325.440	588,13

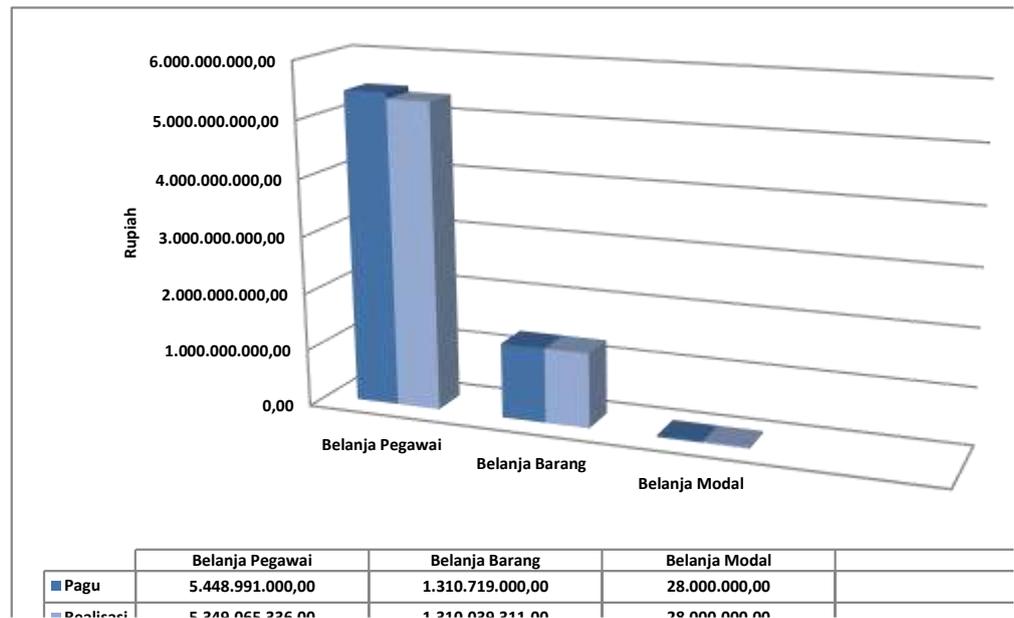
B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
 Negara
 Rp.6.687.104.647*

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.6.687.104.647 atau 99 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp.6.787.710.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

belanja dapat dilihat dalam grafik berikutini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 penurunan sebesar 12,58% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.349.065.336,00	5.601.642.240,00	(4,51)
Belanja Barang	1.310.039.311,00	1.396.497.637,00	(6,19)
Belanja Modal	28.000.000	651.570.000	(95,70)
Jumlah	6.687.104.647	7.649.709.877	(12,58)

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pada Tahun Anggaran 2023 ini Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan Belanja Modal AC sebesar Rp. 28.000.000,- yang lebih kecil dari Tahun Anggaran 2022 berupa pc unit dan genset sebesar Rp. 552.500.000,- dan tambah daya sebesar Rp. 100.000.000,- ,
2. Jumlah Pegawai berkurang dengan adanya pegawai yang mutasi.

Belanja Pegawai
Rp.5.349.065.336

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.349.065.336 dan Rp.5.601.642.240

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 turun sebanyak 4,51 persen dibandingkan realisasi belanja 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Mutasi pegawai dan hakim.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.898.575.553	5.157.935.636	(5,03)
Belanja Uang Makan PNS	450.490.000	444.685.000	1,31
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	5.349.065.553	5.602.620.636	(4,53)
Pengembalian Belanja Pegawai	(217)	(978.396)	(99,978)
Jumlah Belanja	5.349.065.336	5.601.642.240	(4,51)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.1.310.039.311

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.310.039.311 dan Rp.1.396.497.637. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 turun sebesar 6,19 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	630.326.898	595.639.954	4,04
Belanja Barang Non Operasional	11.605.000	3.500.000	(42,83)
Belanja Barang Persediaan	74.702.355	87.696.000	(14,82)
Belanja Jasa	25.981.850	185.403.984	(85,99)
Belanja Pemeliharaan	547.218.711	516.307.699	5,99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.204.497	7.950.000	154,14
Jumlah Belanja Kotor	1.310.039.311	1.396.497.637	(6,19)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.310.039.311	1.396.497.637	(6,19)

Hal ini antara lain disebabkan :

1. Turunnya anggaran belanja persediaan serta anggaran belanja jasa pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dimana semua Anggaran pada Tahun 2023 realisasi telah dilaksanakan dengan baik.

Belanja Modal
Rp.28.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.28.000.000 dan Rp. 651.570.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar 95,70 % dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh besaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 lebih kecil dari pada Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan karena pada awal Tahun Anggaran satker Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapat belanja modal hingga pada bulan oktober 2023 mendapatkan belanja modal AC dari Anggaran perubahan sebesar Rp. 28.000.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	651.570.000	(95,70)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	28.000.000	651.570.000	(95,70)
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	28.000.000	651.570.000	(95,70)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.552.500.000

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.28.000.000. Mengalami penurunan sebesar 95,70% bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.651.570.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pembelian Peralatan Mesin	28.000.000	651.570.000	(95,70)
Belanja penambahan nilai peralatan mesin	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	28.000.000	651.570.000	(95,70)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	28.000.000	651.570.000	(95,70)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa 4 unit AC.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.36.273.000

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	36.273.000	0	100,00
Jumlah Belanja	36.273.000	0	100,00

Belanja Modal gedung dan bangunan berupa penambahan daya listrik untuk gedung kantor sebesar Rp. 36.273.000 yang direalisasikan pada bulan Desember 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-23	31 Des 2022
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP/TUP	0	0
Rekening Virtual Bank BRI	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp.0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Mess Hakim yang telah dipotong dengan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2023 yang telah dibuat dan pada bulan September 2023 sehingga muncul Piutang Bukan Pajak yang disajikan sebagai berikut

Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember TA 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNBPN	0	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	0	

Nilai Persediaan
Rp.13.420.185

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.13.420.185 dan Rp.6.079.100.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Persediaan	31-Des-23	31 –Des- 2022
Barang Konsumsi	12.684.960	1.240.500
Bahan untuk Pemeliharaan	735.225	459.500
Jumlah	13.420.185	6.079.100

Semua persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik senilai Rp.13.420.185 dan telah diopname fisik tanggal 31 Desember 2023 Nomor : W13.U5/3513/OT.01.2/XII/2023.

Tanah
Rp.17.638.690.000

C.4 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah pada wilayah Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.17.638.690.000. Tabel mutasi tanah pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	17.638.690.000
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Revaluasi)	0
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	-
Saldo per 31 Desember 2023	17.638.690.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.638.690.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2023

No	K	Luas	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.	I	(m ²)				
B						
1	1	295	SHP No.18/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	991.974.000
2	2	305	SHP No.17/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.017.339.000
3	3	324	SHP No.16/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.072.055.000
4	4	358	SHP No.36/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.194.123.000
5	5	391	SHP No.19/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.304.197.000
6	6	399	SHP No.20/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.330.880.000
7	7	434	SHP No.37/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.436.025.000
8	8	630	SHP No.06/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	2.025.4855.000
9	1	2.759	SHP No.07/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Kantor	7.266.599.000
Jumlah						17.638.690.000

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp.3.945.244.919

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.3.945.244.919 dan Rp.3.588.092.419. Mutasi nilai peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.588.092.419
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	28.000.000
Perolehan Lainnya	Rp	333.011.500
Mutasi kurang:		
Alih status Transfer Keluar	Rp	3.859.000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	3.945.244.919
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(3.282.418.846)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	662.826.073

Mutasi tambah berasal dari Pembelian 4 Unit AC senilai Rp. 28.000.000 serta peralatan dan mesin transfer masuk dari BUA Mahkamah Agung RI dan PT Yogyakarta sejumlah Rp. 333.011.500. Mutasi kurang berasal dari alih status BMN yang di transfer keluar ke Badilum sejumlah Rp 3.859.000.

Gedung dan Bangunan
Rp.7.879.548.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.7.879.548.000 dan Rp.7.879.548.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2022	7.879.548.000
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	36.273.000
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	7.915.821.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.149.772.272)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.766.048.728

Terdapat mutasi penambahan pada Gedung dan Bangunan dari hasil koreksi pencatatan untuk jalan, irigasi dan jembatan yang dimasukkan ke dalam gedung dan bangunan. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.0

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.36.273.000.

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2022	36.273.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	36.273.000
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Terdapat mutasi pengurangan pada transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikoreksi menambah kedalam gedung dan bangunan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp.48.342.062

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.48.342.062 dan Rp.48.342.062. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	48.342.062
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	48.342.062
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	48.342.062

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
 Pengerjaan Rp.0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Jumlah		-		-	

Tidak terdapat Pengembangan Melalui KDP .

Akumulasi Penyusutan
 Aset Tetap
 (Rp.7.432.191.118)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp.7.432.191.118) dan (Rp.6.315.384.195). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menggunakan data per 31 Desember 2023. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3.945.244.919	Rp 3.282.418.864	Rp 662.826.055
2	Gedung dan Bangunan	Rp 7.915.821.000	Rp 4.149.772.272	Rp 3.766.048.728
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 48.342.062	Rp 0	Rp 48.342.062
Akumulasi Penyusutan		Rp 11.909.407.981	Rp 7.432.191.118	Rp 4.477.216.845

Rincian akumulasi penyusutan asset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp.0.

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud terdapat pada Satker Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	-
Lisensi	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain
 Rp.76.071.000

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.76.071.000 dan Rp.150.071.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Bantul. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	150.071.000
Mutasi tambah:	0
Reklas Masuk dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0.000
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	74.000.000
Saldo per 31 Desember 2023	76.071.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	76.071.000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.76.071.000

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.76.071.000 dan Rp.150.071.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	76.071.000	76.071.000	0
Jumlah	76.071.000	76.071.000	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.0

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.1.039.640

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.1.039.640 dan Rp.12.646.357. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 0
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 1.039.640
Total		Rp 1.039.640

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp.0

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022*

Keterangan	31-Des-22	31 Des 2022
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	-
Jumlah	00	-

Ekuitas
Rp.22.128.000.075

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.128.000.075 dan Rp.22.868.017.029. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.4.756.906

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.756.906 dan Rp.5.729.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.756.906	7.163.000	(33,59)
Pendapatan luran dan Denda			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	4.756.906	7.163.000	(33,59)

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp.4.756.906 periode yang berakhir 31 Desember 2023 berasal dari: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Mess Hakim Tinggi di Pengadilan Negeri Bantul.

Beban Pegawai
Rp.5.338.226.330

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.338.226.330 dan Rp.5.609.925.646. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
 Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Des 2023	PER 31 Des 2022	NAIK(TURUN) %
Beban Gaji	2.558.493.780	2.610.858.720	(2,01)
Beban Pembulatan Gaji	31.624	36.175	(12,58)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	2.338.418.143	3.000.009.147	(22,05)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	441.283.000	451.376.000	(2,24)
Beban Tunjangan-Tunjangan TNI/Polri	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai Kotor	5.338.226.547	5.424.525.919	(1,59)
Pengembalian Beban Pegawai	(217)	(978.396)	(99,97)
Jumlah	5.338.226.330	5.609.925.646	(4,84)

Beban Persediaan
 Rp.65.207.890

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.65.207.890 dan Rp.75.964.200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	65.207.890	75.964.200	(14,16)
Jumlah Beban Persediaan	65.207.890	75.964.200	(14,16)

Beban Barang
 dan Jasa
 Rp.665.479.370

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.665.479.370 dan Rp.772.170.789. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	545.132.398	492.263.601	10,74
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.954.500	13.899.800	7,59
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68.724.000	38.520.000	78,41
Beban Barang Operasional Lainnya	0	48.812.753	0,00
Beban Barang Operasional – COVID 19	0	3.695.800	0,00
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable	11.605.000	3.500.000	231,57
Beban Barang Non Operasional – Penanganan COVID 19			0,00
Beban Langganan Listrik	0	140.905.259	0,00
Beban Langganan Telepon	1.362.839	1.338.676	1,80
Beban Langganan Air	3.427.300	2.000.200	71,35
Beban Sewa	20.273.333	25.400.700	(20,19)
Beban Jasa – Penanganan COVID 19	0	1.870.000	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa Kotor	665.479.370	772.170.789	(13,82)
Pengembalian Beban Belanja	0	0	0,00
Jumlah	665.479.370	772.170.789	(13,82)

Beban
Pemeliharaan
Rp.549.372.091

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.549.372.091 dan Rp. 523.660.399. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	323.339.880	292.670.610	10,48
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	59.169.657	59.167.463	0,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.709.174	164.469.626	0,15
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	2.153.380	7.352.700	(70,71)
Jumlah	549.372.091	523.660.399	4,91

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.20.204.497

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.204.497 dan Rp.7.950.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	15.404.497	5.550.000	177,56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	2.400.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			0,00
Beban Perjalanan Dinas Kotor	20.204.497	7.950.000	154,44
Pengembalian Beban Perjalanan	0	0	0,00
Jumlah	20.204.497	7.950.000	154,44

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.866.343.280

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.866.343.280 dan Rp. 882.106.648.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	227.916.776	243.507.416	(6,40)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	638.426.504	634.971.932	0,54
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	3.627.300	0,00
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	866.343.280	882.106.648	(1,79)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp.43.230.180.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 Rp.43.230.180 dan 31 Desember 2022 Rp.0.

Rincian Kegiatan Non Operasional
 Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	43.230.180	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43.230.180	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84	185.440	(99,955)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84	185.440	(99,955)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	43.230.180	185.440	23.212,22

Pos Luar Biasa Rp.0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.22.868.017.029.*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.868.017.029 dan Rp. 22.863.427.441

*Defisit LO
(Rp.7.456.846.372)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp.7.456.846.372) dan (Rp.7.864.429.242). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Rp.0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Merupakan koreksi pencatatan pada nilai persediaan. Untuk 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp.0.*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp.17.272.857).*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.17.272.857 dan (Rp.42.792.857).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.6.699.556.561

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.699.556.561 dan Rp.7.911.811.687. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	48.964.086
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.687.104.647
Transfer Masuk	61.416.000
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	6.699.556.561

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.48.964.086 sedangkan DKEL sebesar Rp.6.687.104.647.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.333.011.500. Sedangkan untuk Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.859.000.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0.

Ekuitas Akhir
Rp.22.128.000.075

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.128.000.075 dan Rp.22.868.017.029.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul yang sebelumnya menggunakan Rekening Giro pada tahun ini dirubah menjadi Rekening Virtual sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, dengan keterangan sebagai berikut: Virtual Account BRI Cabang Bantul nomor rekening : 653254001721000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

F.2.3 REVISI DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA disajikan dalam laporan pendukung Catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.4 RALAT SPM, SSBP, SSPB

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.

F.2.5 CATATAN PENTING LAINNYA

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang telah terjadi dan juga instruksi dari Menteri Keuangan maka dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dialokasikan pada anggaran khusus pandemi covid-19 dengan akun khusus juga. Kantor Pengadilan Negeri Bantul telah mengakomodir instruksi tersebut dengan mengalokasikan anggaran dan akun khusus tersebut dan telah dilaksanakan.